ARTIKEL

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 - 2016

Oleh:

DEVI MAULINDA AGUSTIN

NPM : 14.1.02.01.0032

Dibimbing oleh :

1. **Suhardi, S.E., M.Pd.**
2. **Hestin Sri Widiawati, S.Pd., M.Si.**

PROGRAM STUDI AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

2018

SURAT PERNYATAAN
ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2018

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap	: DEVI MAULINDA AGUSTIN
NPM	: 14.1.02.01.0032
Telepun/HP	: 085708296648
Alamat Surel (Email)	: devimaulinda88@gmail.com
Judul Artikel	: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Modal Di Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 - 2016
Fakultas – Program Studi	: Ekonomi - Akuntansi
Nama Perguruan Tinggi	: Universitas Nusantara PGRI Kediri
Alamat Perguruan Tinggi	: Jl. K.H. Achmad Dahlan No.76 Kediri

Dengan ini menyatakan bahwa :

a. artikel yang saya tulis merupakan karya saya pribadi (bersama tim penulis) dan bebas plagiarisme;
b. artikel telah diteliti dan disetujui untuk diterbitkan oleh Dosen Pembimbing I dan II.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian data dengan pernyataan ini dan atau ada tuntutan dari pihak lain, saya bersedia bertanggungjawab dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Mengetahui		Kediri, 20 Agustus 2018
Pembimbing I	Pembimbing II	Penulis,
Suhardi, S.E., M.Pd. **NIDN. 0701105804**	**Hestin Sri Widiawati, S.Pd., M.Si.** **NIDN. 0708037605**	**Devi Maulinda Agustin** **NPM. 14.1.02.01.0032**

PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) TERHADAP ALOKASI BELANJA MODAL DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2014 – 2016

DEVI MAULINDA AGUSTIN
14.1.02.01.0032
Ekonomi – Akuntansi
devimaulinda88@gmail.com
Suhardi, S.E., M.Pd. dan Hestin Sri Widiawati, S.Pd., M.Si.
UNIVERSTITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi bahwa penilaian pengelolaan keuangan daerah dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perlu dilakukan untuk mengetahui apakah sumber dana dalam bentuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) seperti sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pengalokasian belanja modal di setiap daerah sudah terealisasi secara baik apa belum. Penilaian pengelolaan keuangan daerah juga diperlukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengetahui apakah sumber pendanaan benaja modal sudah terarahkan pada belanja modal apa belum dalam meningkatkan potensi di setiap daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara parsial maupun simultan terhadap alokasi belanja modal di Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini meliputi 18 Kabupaten / Kota di Provinsi Jawa Timur dan di analisis menggunakan regresi linier berganda dengan *software for windows versi 23*. Kesimpulan hasil penelitian ini adalah (1) Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal, sedangkan Pajak Daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal. (2) Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal.

KATA KUNCI : Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah dan Lain-lain PAD yang Sah.

I. LATAR BELAKANG

Perkembangan otonomi daerah di Indonesia semakin hari semakin mengalami peningkatan. Di Indonesia memiliki 34 Provinsi setiap daerahnya, salah satunya yaitu Provinsi Jawa Timur. Provinsi Jawa Timur merupakan salah satu provinsi yang telah menerapkan otonomi daerah. Otonomi daerah merupakan sistem pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah (Nuarisa,2012). Dengan diberlakukannya otonomi daerah bertujuan untuk dapat memiliki hak, wewenang dan kewajiban dalam mengatur sendiri urusan pemerintah serta kepentingan masyarakat. Dimana hal ini dimaksudkan agar pemerintah bisa mengembangkan potensi daerah, dapat memberikan kewenangan dalam mengeksplorasi sumberdaya yang dimiliki oleh daerah secara efektif dan efisien dengan tujuan agar dapat mengoptimalkan kinerja keuangan daerah serta meningkatkan kemandirian otonomi daerah. Hal ini diharapkan setiap daerah otonomi mampu meningkatkan pelayanan diberbagai sektor, terutama sektor publik.

Dalam upaya meningkatkan pelayanan publik, pemerintah daerah wajib mengalokasikan sejumlah dana dalam bentuk anggaran belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk menambah aset tetap daerah. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (tahun) anggaran yang terhitung mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember. APBD menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Fungsi ini menjadikan APBD penting karena kegiatan pemerintah daerah tidak dapat dilaksanakan jika tidak direncanakan dan dicantumkan dalam APBD. Oleh karena itu, APBD sangat penting dalam pengelolaan keuangan daerah. Penetapan APBD harus dilakukan tepat waktu agar program kegiatan pembangunan yang direncanakan dapat terealisasi pada tahun anggaran, sehingga pemberian pelayanan publik terhadap masyarakat dapat berjalan dengan lancar.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan daerah dalam menghasilkan pendapatan. Setiap penyusunan APBD, alokasi belanja modal harus disesuaikan dengan kebutuhan

daerah dengan mempertimbangkan pendapatan yang diterima.

Dalam meningkatkan potensi daerah maka pemerintah daerah perlu sumber pendanaan bagi belanja daerah yang diarahkan pada belanja modal. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk aset tetap berwujud yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal mencakup belanja modal untuk memperoleh tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tak berwujud (Erlina dan Rusdianto,2013). Alokasi belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun fasilitas publik. Dengan adanya pengalokasian belanja modal pada APBD dapat membantu dan mendorong percepatan pembangunan dalam suatu otonomi di setiap daerah.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam pengalokasian belanja modal yakni penerimaan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah (Baldric Siregar,2015). APBD sangat berkaitan dengan PAD, karena semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah bukan pendapatan dari bantuan, maka daerah akan semakin leluasa untuk mengakomodasikan kepentingan masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal dari sumber penerimaan daerah meliputi: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah merupakan komponen dari alokasi belanja modal Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan hasil dari data realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Timur tahun 2014 mengatakan bahwa pelampauan realisasi pendapatan telah mencapai sebesar Rp 14.442.516.534.958,94 dari total pelampauan pendapatan yang didominasi oleh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah. Pada sektor belanja tahun 2014 telah terjadi tidak terserapnya sebesar Rp. 1.050.863.438.287,80. Realisasi belanja yang tidak terserap tersebut paling besar disumbangkan oleh tidak terealisasinya belanja modal (www.bpkad.jatimprov.go.id). Hal ini membuktikan bahwa Kabupaten / Kota di Jawa Timur dalam merealisasikan belanja modal masih kurang optimal, sehingga adanya pencapaian pada pendapatan. Oleh

sebab itu, Pemerintah Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan daerahnya sehingga dapat mandiri dalam pengelolaan keuangan dan dapat mengurangi ketergantungan pemerintah pusat (Diah Sulistyowati,2011).

Pada penelitian yang dilakukan oleh Novianto dkk (2015) mengenai Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintahan Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat dapat disimpulkan bahwa persentase anggaran alokasi belanja modal pada tahun 2013 menunjukkan mengalami rendahnya alokasi belanja modal sebesar 28%, disebabkan ada beberapa pemerintahan daerah masih belum bisa mencapai target. Oleh karena itu, anggaran belanja modal belum bisa terserap dan terealisasi secara baik.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : "**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Alokasi Belanja Modal di Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016".**

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016?
2. Apakah retribusi daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016?
3. Apakah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016?
4. Apakah lain-lain PAD yang sah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap alokasi belanja modal di Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016?
5. Apakah pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap

alokasi belanja modal di Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016?

II. METODE PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Analisis Data

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang menggunakan angka-angka dan dianalisis menggunakan statistik. Sedangkan teknik penelitian menggunakan teknik *expost facto*, yaitu pengamatan yang terjadi melihat ke belakang dapat menimbulkan kejadian.

Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan populasi sebanyak 38 Kabupaten / Kota di Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2016. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*. Adapun kriteria *purposive sampling* untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Data laporan realisasi APBD Provinsi Jawa Timur Kabupaten / Kota yang terdaftar di BPS dalam periode 2014-2016.
2) Kabupaten / Kota yang tidak mempublikasikan laporan realisasi APBD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2016.

Berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan peneliti, maka didapat jumlah sampel sebanyak 18 Kabupaten / Kota.

Metode Pengumpulan Data

Data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Data sekunder penelitian ini berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten / Kota Provinsi Jawa Timur yang tersedia di Badan Pusat Statistik. Teknik pengumpulan data penelitian ini melalui studi kepustakaan

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda, dimana variabel terikatnya (Y) dihubungkan lebih dari satu variabel, mungkin bisa dua atau lebih variabel bebas (X_1, X_2, X_3, X_4) namun masih menunjukkan diagram hubungan yang linier.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Uji Normalitas

Uji normalitas adalah digunakan untuk menguji apakah dalam metode regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal ataukah tidak mempunyai distribusi normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal (Ghozali, 2016:154).

Analisis Grafik

Analisis grafik dapat dilihat melalui grafik histogram maupun normal *probability plot*. Grafik histogram adalah adalah model regresi digunakan untuk membandingkan antara data observasi dengan data distribusi yang mendekati distribusi normal, sedangkan normal *probability plot* adalah model regresi digunakan untuk membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal,data menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal, maka dapat disimpulkan model regresi ini telah memenuhi asumsi normalitas (Ghozali, 2016:156).

Analisis Statistik

Uji statistik yang dapat dilakukan dalam uji normalitas adalah uji *Kolmogorof- Smirnov*. Secara multivarian pengujian normalitas data dilakukan terhadap nilai residualnya. Dikatakan data distribusi normal apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05 (Ghozali, 2016:158).

Uji Multikolonieritas

Uji Multikolinieritas adalah digunakan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya korelasi antar variabel bebas atau *independen*. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel dependen, untuk mendeteksi multikolonieritas pada suatu model dapat diketahui jika nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) > 10 dan nilai *Tolerance* < 0,010 (Ghozali, 2016:103).

Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi adalah digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dan dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya), untuk mendeteksi autokorelasi dapat dilakukan uji statistic melalui *Durbin-Watson* (DW test). (Ghozali, 2016:107).

Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas adalah digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan

varian dari residual satu pengamatan lain tetap maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas, untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi dan sumbu X adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di *studentized* serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y (Ghozali, 2016:134).

Analisis Linier Berganda

Analisis regresi ganda adalah analisis peramalan nilai pengaruh dua variabel bebas atau lebih terhadap satu variabel terikat dengan tujuan untuk mengestimasikan atau memprediksi rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui (Ghozali, 2011:113). Model persamaan analisis regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$BM = \alpha + \beta_1 PD + \beta_2 RD + \beta_3 HPKDD + \beta_4 LPADS + \varepsilon$$

Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah digunakan untuk menguji tingkat keeratan antar variabel *dependen* dan variabel *independen* yang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi (*adjusted R-square*). Nilaikoefisien determinasi (R^2) adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel *independen* dalam menjelaskan variasi variabel *dependen* sangat terbatas. Jika R^2 yang diperoleh mendekati satu maka dapat dikatakan semakin kuat model tersebut menerangkan variabel *independen* terhadap variabel *dependen* (Ghozali, 2016:95).

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Uji parsial (t – test) regresi adalah digunakan untuk melihat seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas atau *independen* secara individual dalam menerangkan variasi variabel *dependen* dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Kriteria pengujian yang digunakan dengan membandingkan nilai signifikan yang diperoleh dengan taraf signifikan yang telah ditentukan yaitu 0,05. Apabila nilai signifikan < 0,05 maka variabel *independen* mampu mempengaruhi variabel *dependen* secara signifikan atau hipotesis diterima (Ghozali, 2016:97).

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel *independen* atau bebas yang dimasukkan dalam model

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel *dependen* atau terikat. Pengujian ini dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikan sebesar 0,05 (α = 5%) (Ghozali, 2016:96).

III. HASIL DAN KESIMPULAN

Uji Normalitas

Tabel 1

Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram

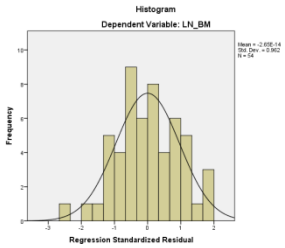

Sumber : *Output* SPSS versi 23, data diolah 2018

Berdasarkan analisis grafik diatas hasil uji normalitas grafik histogram di atas, dapat dilihat bahwa pola gambar grafik histogram berbentuk simetris, distribusi data tidak menceng ke kanan atau menceng ke kiri, maka data tersebut dinyatakan telah terdisribusi normal. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 2

Hasil Uji Normal *Probability Plot*

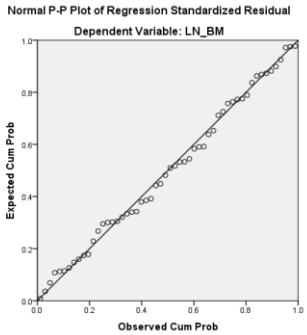

Sumber : *Output* SPSS versi 23, data diolah 2018

Berdasarkan analisis grafik normal *probability plot* di atas dapat dinyatakan telah terdistribusi normal. Hal ini ditunjukkan pada grafik normal probability *plot* data telah menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi telah memenuhi asumsi normalitas.

Analisis Statistik

Tabel 3

Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		54
Normal Parameters[a,b]	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.44797564
Most Extreme Differences	Absolute	.057
	Positive	.057
	Negative	-.047
Test Statistic		.057
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200[c,d]

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.
c. Lilliefors Significance Correction.
d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : *Output* SPSS versi 23, data diolah 2018

Berdasarkan analisis statistik tabel di atas hasil uji nornalitas dengan menggunakan uji *Kolmogorov- Smirnov test* (K-S), menunjukkan nilai asymp. Sig. (2-*tailed*) lebih besar dari taraf signifikan yang ditetapkan sebesar 0,05 atau 5% yaitu 0,200. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data residual yang diolah telah terdistribusi normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinieritas

Tabel 4

Hasil Uji Multikolonieritas

Coefficients[a]

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	(Constant)		
	LN_PD	.053	1.872
	LN_RD	.038	2.616
	LN_HPKDD	.069	1.438
	LN_LPADS	.103	9.744

a. Dependent Variable: LN_BM

Sumber : *Output* SPSS versi 23, data diolah 2018

Berdasarkan uji multikolinieritas di atas, dapat dilihat bahwa variabel Pajak Daerah memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,053 dan nilai VIF sebesar 1,872, variabel Retribusi Daerah memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,038 dan nilai VIF sebesar 2,616, variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,069 dan nilai VIF sebesar 1,438, serta variabel Lain-lain PAD yang sah memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,103 dan nilai VIF sebesar 9,744. Hal ini berarti tidak ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas karena empat variabel tersebut sudah memenuhi pengambilan keputusan yaitu mempunyai nilai *Tolerance* > 0,010 dan VIF < 0,10.

Uji Autokorelasi

Tabel 5

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary[b]

Model	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.46590	2.021

a. Predictors: (Constant), LN_LPADS, LN_HPKDD, LN_PD, LN_RD

b. Dependent Variable: LN_BM

Sumber : *Output* SPSS versi 23, data diolah 2018

Dari hasil uji autokorelasi dengan *Durbin*-Watson dengan ketentuan $d_U < d < 4 - d_U$. Jika nilai d antara d_U dan $4 - d_U$ berarti bebas dari autokorelasi. Dengan melihat kriteria dari *Durbin-Watson* yaitu n = 54 dan k = 4 didapat 1,7234,

sedangkan 4 – d = 4 - 1,7234 = 2,2766. Berdasarkan tabel di atas nilai d = 2,021 lebih besar dari nilai d_U = 1,7234 dan kurang dari 4 – 1,7234 (4 – d_U) = 2,2766 atau 1,7234 > 2,021 < 2,2766, maka dapar disimpulkan tidak terjadi autokorelasi.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6

Hasil Grafik *Scatterplot*

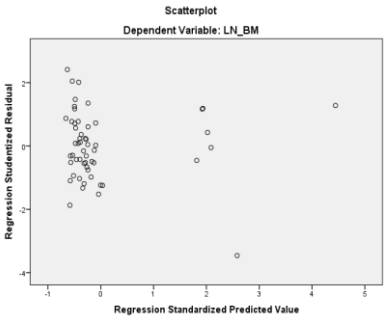

Sumber : *Output* SPSS versi 23, data diolah 2018

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa hasil grafik *scatterplot* terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tidak menunjukkan pola tertentu, tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi heteroskedstisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 7

Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients B	Unstandardized Coefficients Std. Error	Standardized Coefficients Beta
1	(Constant)	2.627	.701	
	LN_PD	.041	.096	.040
	LN_RD	.298	.117	.285
	LN_HPKDD	.201	.083	.200
	LN_LPADS	.446	.063	.483

a. Dependent Variable: LN_BM

Sumber : *Output* SPSS versi 23, data diolah 2018

Berdasarkan tabel di atas, maka didapat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

BM = 2,627 + 0,041 PD + 0,298 RD + 0,201 HPKDD + 0,446 LPADS

Persamaan regresi tersebut mempunyai makna sebagai berikut:

a) Konstanta = 2,627

Nilai tersebut mengindikasikan bahwa jika variabel Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah bernilai tetap maka variabel belanja modal adalah sebesar 2,627.

b) Koefisien X_1 = 0,041

Nilai tersebut mengindikasikan bahwa jika variabel pajak daerah mengalami peningkatan sebesar satu

satuan, dengan asumsi variabel retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah tetap dan tidak berubah, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,041. Namun sebaliknya, jika variabel pajak daerah turun satu satuan dengan asumsi variabel retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah tetap dan tidak berubah, maka akan menurun belanja modal sebesar 0,041.

c) Koefisien $X_2 = 0,298$

Nilai tersebut mengindikasikan bahwa jika variabel retribusi daerah mengalami peningkatan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah tetap dan tidak berubah, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,298. Namun sebaliknya, jika variabel retribusi daerah turun satu satuan dengan asumsi variabel pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah tetap dan tidak berubah, maka akan menurun belanja modal sebesar 0,298.

d) Koefisien $X_3 = 0,201$

Nilai tersebut mengindikasikan bahwa jika variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah tetap dan tidak berubah, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,201. Namun sebaliknya, jika variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan daerah turun satu satuan dengan asumsi variabel pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain PAD yang sah tetap dan tidak berubah, maka akan menurun belanja modal sebesar 0,201.

e) Koefisien $X_4 = 0,446$

Nilai tersebut mengindikasikan bahwa jika variabel lain-lain PAD yang sah mengalami peningkatan sebesar satu satuan, dengan asumsi variabel pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap dan tidak berubah, maka belanja modal akan meningkat sebesar 0,446. Namun sebaliknya, jika variabel lain-lain PAD yang sah turun satu satuan dengan asumsi variabel pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan tetap dan tidak berubah, maka akan menurun belanja modal sebesar 0,446.

Koefisien Determinasi

Tabel 8

Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary[b]

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.988[a]	.977	.975	.46590	2.021

a. Predictors: (Constant), LN_LPADS, LN_HPKDD, LN_PD, LN_RD

b. Dependent Variable: LN_BM

Sumber : *Output* SPSS versi 23, data diolah 2018

Berdasarkan hasil *output* pada tabel di atas koefisien determinasi (*adjusted R square*) diperoleh sebesar 0,975. Hal ini menunjukkkan bahwa PD, RD, HPKDD dan LPADS terhadap BM sebesar 97,5%. Sementara itu sisanya (100% - 97,5% = 2,5%) dijelaskan variabel lain yang tidak di kaji dalam penelitian ini.

Uji Hipotesis Secara Parsial (Uji t)

Tabel 9

Hasil Uji t (secara Parsial)

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.627	.701		3.748	.000		
LN_PD	.041	.096	.040	.424	.674	.053	18.728
LN_RD	.298	.117	.285	2.556	.014	.038	26.167
LN_HPKDD	.201	.083	.200	2.411	.020	.069	14.389
LN_LPADS	.446	.063	.483	7.092	.000	.103	9.744

a. Dependent Variable: LN_BM

Sumber: *Output* SPSS versi 23, data diolah 2018

Berdasarkan hasil uji di atas diperoleh uji sebagai berikut :

a) Pengujian hipotesis 1

H_0 : $\beta_1 = 0$, Pajak Daerah (X_1) parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal (Y).

H_a : $\beta_1 \neq 0$, Pajak Daerah (X_1) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS versi 23 dalam tabel diperoleh nilai signifikan variabel pajak daerah adalah 0,674. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel pajak daerah lebih besar dari 0,05 yang berarti H_0 diterima dan H_a ditolak, jadi dapat disimpulkan bahwa pajak daerah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

b) Pengujian hipotesis 2

H_0 : $\beta_2 = 0$, Retribusi Daerah (X_2) secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal (Y).

H_a : $\beta_2 \neq 0$, Retribusi Daerah (X_2) secara parsial berpengaruh

positif signifikan terhadap belanja modal (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS versi 23 dalam tabel diperoleh nilai signifikan variabel retribusi daerah adalah 0,014. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel retribusi daerah lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

c) Pengujian hipotesis 3

H_0 : $\beta_3 = 0$, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal (Y).

H_a : $\beta_3 \neq 0$, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (X_3) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS versi 23 dalam tabel diperoleh nilai signifikan variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah 0,020. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

d) Pengujian hipotesis 4

H_0 : $\beta_4 = 0$, Lain-lain PAD yang sah(X_4) secara parsial tidak berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal (Y).

H_a : $\beta_4 \neq 0$, Lain-lain PAD yang sah (X_4) secara parsial berpengaruh positif signifikan terhadap belanja modal (Y).

Berdasarkan hasil perhitungan pada SPSS versi 23 dalam tabel diperoleh nilai signifikan variabel lain-lain PAD yang sah adalah 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji t variabel lain-lain PAD yang sah lebih kecil dari 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima, jadi dapat disimpulkan bahwa lain-lain PAD yang sah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

Uji Hipotesis Secara Simultan (Uji F)

Tabel 10

Hasil Uji F (secara Simultan)

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	444.901	4	111.225	512.407	.000[b]
	Residual	10.636	49	.217		
	Total	455.538	53			

a. Dependent Variable: LN_BM

b. Predictors: (Constant), LN_LPADS, LN_HPKDD, LN_PD, LN_RD

Sumber: *Output* SPSS versi 23, data diolah 2018

Berdasarkan hasil uji di atas diperoleh uji sebagai berikut :

H_0 : $\beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$, Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara simultan tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Ha : minimal ada satu $\beta_i \neq 0$;dimana $i > 1$, 2, 3, Pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh terhadap belanja modal.

Berdasarkan hasil perhitungan uji F dalam tabel 4.11 diperoleh nilai signifikan adalah 0,000. Nilai tersebut di bawah nilai 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa nilai signifikan uji F variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah < 0,05 yang berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah secara simultan berpengaruh signifikan terhadap belanja modal.

IV. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan

lain-lain PAD yang sah terhadap belanja modal di Provinsi Jawa Timur 2014-2016. Berdasarkan penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Pajak Daerah tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t (parsial) variabel Pajak Daerah sebesar 0,674 (nilai sig > 0,05).
2. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Retribusi Daerah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t (parsial) variabel Retribusi Daerah sebesar 0,014 (nilai sig < 0,05).
3. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t (parsial) variabel Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar 0,020 (nilai sig < 0,05).
4. Berdasarkan pengujian secara parsial menunjukkan bahwa Lain-lain PAD yang sah berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dibuktikan dengan hasil uji t (parsial) variabel Lain-lain PAD yang sah sebesar 0,000 (nilai sig < 0,05).
5. Berdasarkan pengujian secara simultan dengan menggunakan hasil uji F dengan nilai signifikasi 0,000 yang berada dibawah 0,05 menyatakan bahwa semua variabel independen yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-lain PAD yang sah berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu belanja modal.

V. DAFTAR PUSTAKA

Erlina dan Rasdianto. 2013. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian

Ghozali, I. 2016. *Aplikasi Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi 8. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro

Halim Abdul dan Muhammad Syam Kusufi. 2012. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat

Handayani, Dwi dan Elva Nuraina. 2012. *Pengaruh Pajak Daerah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja*

Daerah Kabupaten Madiun. Akuntansi dan Pendidikan Vol.1 No.1 Oktober 2012,1-12

Novianto, dkk. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Kinerja Keuangan terhadap Alokasi Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat*. Jurnal Ekonomi 4 (1):1-22. ISSN 2302-7169

Nuarisa, S.A. 2012. *Pengaruh PAD, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Skripsi. Semarang: Universitas Negeri Semarang

Pelealu, dkk. 2013. *Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal Pemerintah Kota Manado Tahun 2003-2012*. Jurnal EMBA 1 (4): 1189-1197. ISSN 2303-1174

Permatasari, dkk. 2016. *Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten / Kota Jawa Timur*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi 5 (1). ISSN 2460-0585

Putteri, dkk. 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal (Studi Kasus pada Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Bandung periode 2009-2013)*. Jurnal e-Proceeding of Management 2 (1): 174-183. ISSN 2355-9357

Ramlan, dkk. 2016. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal (Studi pada Pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Aceh)*. Jurnal Magister Akuntansi 5 (2): 79-88. ISSN 2302-0164

Siahaan, M.P. 2016. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Siregar, B. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

———, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

———, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta

Sulistyowati, Diah. 2011. *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokaasi Belanja Modal*. Jurnal Akuntansi Undip 12 April 2011, 1-28

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Kekayaan Daerah*. (Online),

tersedia: www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-58-tahun-2005-tentang pengelolaan-keuangan-daerah/--376-490-PP58_2005

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*. (Online), tersedia: www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-pp-no-71-tahun-2010-tentang-standar-akuntansi-pemerintahan/PP71

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*. (Online), tersedia: www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/33

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan anatara Pemerintah Pusat dan Daerah*. (Online), tersedia: https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/UU332004PerimbanganKeuanganLengkap

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. (Online), tersedia: www.djpk.depkeu.go.id/attach/post-no-28-tahun-2009-tentang-pajak-daerah-dan-retribusi-daerah/UU-427-973-UU_28_Tahun_2009_Ttg_PDRD

www.bpjsjatim.go.id

www.bpkad.jatimprov.go.id